

Bab II

Mengintip Pinang dalam Sensasi: Selintas Potret Pinang di Tanah Aceh

Eki Karsani Apriliyadi

Terhitung sejak 1 Juni 2023, BPS telah melakukan sensus pertanian secara serentak di seluruh Indonesia. Tahun 2023 merupakan sensus pertanian yang ketujuh terhitung sejak sensus pertama pada tahun 1963. Sensus pertanian dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran angka 3 dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Kominfo, 2023 dan BPS, 2023a). Standar Food and Agriculture Organization (FAO) yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 diyakini dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan berkualitas (Asih, 2023). Hal ini sesuai dengan tujuan utama sensus pertanian, yaitu untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di sektor pertanian (BPS, 2023b).

E. K. Apriliyadi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: ekik001@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Apriliyadi, E. K. (2025). Mengintip pinang dalam sensasi: Selintas potret pinang di tanah Aceh. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 19–58). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c937
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sensus pertanian kali ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya mengeksplorasi sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lainnya yang memiliki keterikatan dengan pertanian, mulai dari hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga jasa pertanian. Direktori pelaku usaha yang digali dalam Sensus Pertanian 2023 ini tidak hanya data dari petani, tetapi juga data-data dari perusahaan pertanian, usaha pertanian lainnya, struktur demografi petani, dan petani milenial (Putri, 2023). Data yang ingin dihasilkan sensus pertanian ini mencakup: (1) data pokok pertanian nasional dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian seperti *urban farming*, perhutanan sosial, dan petani milenial; (2) petani gurem; (3) indikator SDGs pertanian; (4) petani skala kecil (*small-scale food producer*) sesuai standar FAO, dan (5) statistik geospasial (BPS, 2023b).

Dalam hal ini, pinang sebagai komoditas komersial tentu menjadi bagian yang penting untuk digali mengingat potensi yang dimilikinya bisa berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga petani. Tanaman pinang ini sendiri adalah tanaman yang mudah dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Besar. Tanaman pinang dapat tumbuh subur di berbagai lahan, mulai lahan datar sampai lahan berbentuk lereng. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Aceh Besar menanam pinang di kebun atau pekarangan rumah sebagai tanaman pagar atau pembatas. Tanaman ini cukup potensial dikembangkan untuk pemenuhan permintaan pasar dunia yang lumayan besar untuk kebutuhan farmasi dan industri. Sayangnya, potensi pasar dunia yang tersedia belum berdampak positif terhadap peningkatan daya tawar petani pinang. Diperlukan upaya serius untuk memperkuat lembaga tani agar petani pinang lebih berdaya dalam mengelola kegiatan mereka sendiri.

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi secara emik data Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfokus pada perkebunan pinang di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil pendalaman sensus pertanian ini memotret bahwa pinang merupakan tanaman yang memiliki nilai

kultur tertentu yang sangat melekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Namun, potensi pinang belum menjadi pendongkrak utama perekonomian keluarga petani. Fenomena ini disebabkan oleh jalur-jalur perniagaan yang masih dikuasai oleh para pemodal, baik di tingkat lokal sampai tingkat di atasnya. Penguasaan jalur perniagaan menjadikan harga pinang sangat fluktuatif. Realitas ini mengesankan bahwa peran lembaga tani tidak berfungsi dengan baik dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan daya tawar petani pinang di Kabupaten Aceh Besar.

A. Menangkap Arti Sensus Pertanian 2023 di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar

Seperti yang diungkapkan Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, bahwa pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil sehingga data hasil sensus ini dapat digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan menjadi *benchmark* statistik pertanian yang ada saat ini. Beliau pun menyatakan bahwa “... yang terpenting data ST 2023 diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan” (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023). Tentu ini menjadi titik pijak strategis yang mesti diterjemahkan oleh seluruh perangkat pendataan Sensus Pertanian 2023 di seluruh Indonesia supaya tujuan sensus pertanian tahun ini tepat sasaran, tepat hasil, dan dapat menghasilkan tindakan yang tepat dalam membangun dunia pertanian di Indonesia.

Proses pendataan dilakukan secara serentak pada Juni–Juli 2023 di seluruh wilayah Indonesia. Selama proses Sensus Pertanian 2023, tidak ada wilayah yang luput dari kegiatan pendataan termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Seluruh perangkat pendataan dipersiapkan sedemikian rupa untuk diterjunkan ke lapangan setelah melewati proses perekrutan dan pelatihan yang dilakukan langsung oleh BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut penanggung jawab pelaksana Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Aceh Besar, pelaksanaan sensus kali ini dirancang secara lebih komprehensif dalam menangkap data dari semua variabel yang digali meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sekilas orang berpikir bila sensus pertanian hanya menyoal data-data numerik yang diperoleh dari rumah tangga petani. Tidaklah demikian, bukan hanya rumah tangga petani saja yang didata, tetapi termasuk juga seluruh unit usaha produktif yang bergerak di dalamnya, dari beragam sektor yang sudah disebutkan, yang memberikan kebermanfaatn ekonomi bagi pelakunya. Pendataan dilakukan guna memperoleh gambaran secara komprehensif dan berkesesuaian dengan kondisi riil yang ada di level masyarakat. Itulah sebabnya cek dan ricek hasil di lapangan mesti selalu dilakukan oleh seluruh perangkat pelaksana sensus, mulai dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), sampai penanggung jawab sensus di tingkat kabupaten demi mendapatkan alur logis dari data yang diperoleh.

Menangkap arti sensus pertanian di tingkat lokal memberi banyak arti. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat membawa angin segar. Tujuannya yang mulia diharapkan dapat memotret realita secara akurat tanpa diboncengi embel-embel sebatas pelaksanaan kegiatan ritual sepuluh tahunan. Data yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan tradisi metodologis keilmuan semata. Lewat cucuran keringat dan air mata, mulai dari para konseptor di tingkat atas dan daerah sampai para eksekutor atau pelaksana kegiatan di lapangan, terselip harapan besar. Harapan agar pelaksanaan sensus pertanian kali ini dapat menghasilkan perubahan yang mendasar dengan memberikan efek terhadap adanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat termasuk petani. Bagi petani, Sensus Pertanian 2023 menjadi momen penting dalam menitipkan harapan terhadap pemerintah bahwa mereka menginginkan adanya perubahan, keadilan, dan keberpihakan terhadap mereka dengan adanya kebijakan yang pro petani. Harapan mereka terdengar seder-

hana, mereka menginginkan kestabilan harga produk tani, ketersediaan sarana produksi, baik pupuk maupun obat-obatan (pestisida), dan bila ada bantuan maka bantuan itu harus tepat sasaran. Sekilas tertangkap momen haru ketika PPL mendengar seluruh keluh kesah petani. Suasana yang penuh emosi saat pendataan menjadi bekal bagi PPL untuk menyampaikan kembali setiap untaian harapan dari petani ke PML, Koseka, dan seterusnya meski tercatat hanya sebagai narasi. Data yang tertangkap secara numerik dapat ditafsir secara akurat supaya bisa menjadi jembatan dalam memahami peta usaha tani yang sesungguhnya dan mampu mendorong keberdayaan petani dalam ruang perumusan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Narasi yang tersampaikan menjadi roh setiap data yang tampil dalam angka. Sinergi keduanya memberi arti bahwa sensus pertanian kali ini penting ke depannya untuk ditindaklanjuti lewat aksi demi petani.

B. Bentang Alam Pertanian: Memotret Pinang (*Areca Catechu* L.) di Aceh Besar

Hamparan hijau yang membentang luas di Aceh Besar menyiratkan bahwa pertanian adalah sektor yang paling mendominasi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah Aceh Besar memiliki luas 2.969 km² yang terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong/desa (Pemkab Aceh Besar, 2021). Sebagian besar wilayah Aceh Besar adalah daratan, sebagian kecil lainnya adalah kepulauan. Penduduk yang tinggal di wilayah Aceh Besar sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak, sedangkan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir lebih banyak mengandalkan hidup dari berkebun, bertani sawah, nelayan, dan beternak (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, t.t). Kondisi alam Aceh Besar yang subur menjadikan wilayah ini cocok menjadi tempat tumbuh berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, seperti padi, sayuran, buah-buahan, kopi, kelapa, lada, pinang, dan lain-lain. Kelapa merupakan komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang dimiliki Aceh Besar dengan lahan seluas 12.575,78 hektar dan jumlah produksi 5.500 ton. Pada Gambar 2.1 memuat peta wilayah Kabupaten Aceh Besar.



Sumber: Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) GIS (2021)

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Aceh Besar

Ketika penulis menjejakkan kaki di Kabupaten Aceh Besar, sempat terpikir mengapa pinang menjadi prioritas narasi emik dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023, padahal Aceh sudah sangat terkenal dengan kopi. Berdasarkan pendapat Asrar et al. (2018), penulis mendapati bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu daerah penghasil pinang terbanyak di Indonesia yang berpotensi luar biasa. Di dalam publikasi *Aceh Besar dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023), tanaman pinang tidak muncul sebagai tanaman komoditas yang tercatat BPS. Informasi tentang tanaman pinang diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2022). Tabel 2.1 memuat angka luas lahan areal dan produksi komoditas pinang perkebunan rakyat di Aceh berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh tahun 2021.

Tabel 2.1 Luas Areal dan Produksi Komoditas Pinang Perkebunan Rakyat Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Angka Tetap Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Pro- duksi (Ton)	Rata-Rata Produk- tivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Simeulue	742	706	675	2.123	245	347	2.927	Wujud Produksi
2.	Aceh Singkil	99	339	306	744	136	400	1.246	Biji Kering
3.	Aceh Selatan	874	1.883	154	2.911	763	405	7.199	
4.	Aceh Tenggara	300	819	111	1.230	342	418	3.875	
5.	Aceh Timur	231	2.475	136	2.841	1.683	680	12.578	
6.	Aceh Tengah	116	193	12	320	143	743	643	
7.	Aceh Barat	712	638	44	1.394	255	400	4.231	
8.	Aceh Besar	709	1.085	147	1.940	652	601	3.050	
9.	Pidie	783	1.808	206	2.797	1.837	1.016	4.338	
10.	Bireuen	1.003	6.986	226	8.215	5.379	770	10.308	
11.	Aceh Utara	816	11.032	510	12.358	4.291	389	18.332	
12.	Aceh Barat Daya	1.638	260	53	1.950	171	656	4.347	
13.	Gayo Lues	171	106	33	310	32	302	1.120	
14.	Aceh Tamiang	194	641	19	854	321	500	2.986	
15.	Nagan Raya	52	545	98	696	213	390	835	
16.	Aceh Jaya	137	547	271	955	224	410	1.014	
17.	Bener Meriah	44	121	57	222	18	149	230	
18.	Pidie Jaya	833	1.333	25	2.191	639	479	2.413	
19.	Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Sabang	143	132	-	275	58	439	297	

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Pro- duksi (Ton)	Rata-Rata Produk- tivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Langsa	1	9	2	11	11	1.256	67	
22	Lhokseumawe	68	139	-	207	137	986	253	
23	Subulussalam	105	325	70	500	129	397	1.125	

Keterangan : 1. TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
 2. TM : Tanaman Menghasilkan
 3. TR : Tanaman Rusak

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh T.A 2022
 (Angka Tetap dari Kabupaten/Kota, 2021)

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, terlihat bahwa wilayah terluas dan jumlah petani (KK) terbanyak untuk perkebunan pinang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Utara, produksi tertinggi berada di Kabupaten Bireun, dan rata-rata produktivitas (kg/ha) berada di Kabupaten Langsa. Meskipun Kabupaten Aceh Besar tidak berada di urutan teratas dari semua kategori di atas, wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang potensial dalam hal pengembangan komoditas pinang dengan lahan seluas 1.940 ha, jumlah produksi 652 ton, rata-rata produktivitas sebesar 601 kg/ha dengan jumlah petani sebanyak 3.050 KK.

Mengingat Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan budi daya tanaman pinang, beberapa kelompok tani yang tersebar di beberapa wilayah desa dan kecamatan telah menerima bantuan berupa bibit pinang lokal serta pupuk dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemerintah Aceh fokus terhadap program pengembangan kawasan tanaman pinang di Aceh Besar (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022). Program pengembangan kawasan tanaman pinang menjadi langkah pemerintah Provinsi Aceh dalam menyikapi peluang ekspor yang ada. Memang tanaman ini memiliki

peluang yang besar dalam hal ekspor, tentunya kabar tersebut sangat menggembirakan, dan dapat dibayangkan betapa banyak petani yang makmur karena berbisnis pinang. Namun, informasi ini berkaitan dengan dunia usaha pinang sebelum tahun 2022. Menjelang lebaran tahun 2022, harga pinang mulai menurun, tetapi tidak turun secara drastis. Tahun 2023 adalah fase harga pinang terus anjlok. Menurut petani, tahun 2023 adalah tahun terparah.

Syukron dan Salim (2022) menyatakan bahwa tanaman pinang adalah tanaman asli dari kawasan Asia Selatan yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah sampai Asia Tenggara dan beberapa pulau di wilayah Laut Pasifik. Wilayah di semenanjung Malaya, Filipina, dan kepulauan di Hindia Timur adalah tempat spesies terbesarnya itu berada (Syukron & Salim, 2022). Tanaman pinang serumpun dengan tanaman kelapa, termasuk ke dalam keluarga tanaman berumah satu (*monoceus*) dan tergolong ke dalam kelas palem-paleman. Di Indonesia, tanaman pinang sudah menyebar secara merata di berbagai wilayah. Beberapa wilayah penghasil pinang di antaranya adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Jawa, Kalimantan Selatan, NTB, dan NTT (Kementerian Pertanian-Direktorat Jendral Perkebunan, t.t). Terdapat beberapa jenis pinang yang ada di Indonesia, yaitu pinang betara, pinang aceh, pinang bulawan, pinang biru, pinang hutan, pinang irian, pinang kelapa, pinang sirih, dan pinang merah (Asrar et al., 2018 dan Universitas Stekom, t.t). Setiap daerah di Indonesia memiliki penamaan sendiri untuk menyebut nama pinang: *pineung* (Aceh), *urai* (Komerling), *pining* (Batak Toba), *penang* (Madura), *jambe* (Sunda, Jawa), *bua*, *ua*, *wua*, *pua*, *fua* (aneka bahasa di Nusa Tenggara dan Maluku), *buah* (Bali), *rapo* (Makassar), *hena* (Ternate), dan berbagai penamaan lainnya (Universitas Stekom, t.t).

Tanaman ini dapat tumbuh subur di berbagai wilayah, mulai tepi pantai sampai dataran 1.000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang merata di sepanjang tahun (Pandin & Rompas 1994 dalam Andesmora, 2021). Nama *pinang* sangat melekat dengan nama *sirih*, karena pada umumnya masyarakat mengenal pinang sebagai te-

man makan sirih. Tidak banyak yang tahu manfaat lain dari tanaman ini; Lutony dalam Firmanda et al. (2022) menyebutkan bahwa pinang bermanfaat sebagai tanaman penghijau, bahan bangunan, bahan ramuan tradisional, bahan baku industri kosmetik, kesehatan, dan bahan pewarna pada industri tekstil.

Euforia ekspor pinang menggejala di berbagai wilayah Aceh pada era sebelum tahun 2022. Pun demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menempatkan pinang sebagai salah satu prioritas komoditas yang dikembangkan di sektor perkebunan dengan pertimbangan: (1) pasarnya sangat luas; (2) pemeliharannya tidak merepotkan; dan (3) bisa langsung menghasilkan setelah tiga tahun ditanam (Herianto, 2021a). Di sisi lain, Provinsi Aceh telah berhasil mengeksport buah pinang ke luar negeri dengan nilai fantastis. Setiap bulan Provinsi Aceh mengeksport buah pinang sebesar 1.377 ton dengan rata-rata nilai nominal sebesar Rp31,35 miliar. Negara yang menjadi tujuan ekspornya adalah Iran, Thailand, dan Malaysia (Herianto., 2021b).

Pohon pinang yang tinggi langsing sekitar 25 meter telah menjadikan tanaman ini sering dijadikan penduduk sebagai tanaman pembatas di kebun-kebun atau di pekarangan rumah. Bagi penduduk Aceh Besar, pinang selain sebagai tanaman pembatas juga sebagai tanaman komoditas produktif yang dapat mendatangkan pendapatan ekonomi keluarga. Menurut Sihombing (2000), komoditas pinang berpotensi besar menjadi lahan usaha dengan alasan sebagai berikut: (1) bibit pinang mudah diperoleh; (2) tidak banyak hama pengganggu dan jarang terserang penyakit; (3) produktif walau ditanam di pekarangan; (4) berbuah kapan saja; (5) jarak tanam yang relatif dekat; serta (6) biaya investasi tidak perlu besar.

Secara umum, para petani hanya memanfaatkan bibit yang tumbuh sendiri di area kebun dalam budi daya tanaman pinang. Jadi, untuk masalah pembibitan mereka tidak merasa khawatir, selama ada tanaman pinang di pekarangan atau kebun, selama itu pula mereka bisa memiliki dan menambah tanaman ini. Kendala teknis yang mereka hadapi hanyalah pada saat fase pemeliharaan bibit yang baru

berkembang atau tanaman yang belum menjadi tanaman dewasa. Sapi peliharaan yang mencari makanan melewati kebun dianggap hama pengganggu karena dapat merusak tanaman pinang yang baru berkembang.

Desa Bathelee Kecamatan Seulimeum, Desa Aneuk Galong Baru Kecamatan Sukamekar, dan Desa Weu Bada Kecamatan Montasik dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi pinang cukup luar biasa (lihat Gambar 2.2). Pohon pinang banyak ditemukan di sepanjang jalan kami menuju lokasi petugas pendataan bertugas. Meskipun tanaman padi sawah tetap menjadi fokus utama budi daya



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.2 Jejeran Pohon Pinang di Kebun Penduduk

petani, pohon pinang tetap berdiri tegak di sepanjang jalan yang kami lewati. Selain di kebun, pohon pinang juga hadir di tengah-tengah kerumunan rumah penduduk di sekitar desa tersebut.

Alasan lain masyarakat menanam pinang adalah karena ia bisa tumbuh dengan subur tanpa pernah dipupuk. Biji pinang yang jatuh dari pohonnya dapat tumbuh menjadi tanaman baru tanpa perlu diberi perawatan khusus. Karakter pinang yang dianggap bandel dan berumur panjang serta berbuah tiada henti dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan hasil bincang-bincang dengan sejumlah penduduk yang tinggal di desa tersebut, diperoleh informasi bahwa pinang sering kali menjadi tanaman amanat dari para orang tua yang meminta anaknya menanam pohon tersebut. Hal ini menjadikan pohon pinang memiliki nilai kultural tersendiri untuk dikenang bagi sebagian dari mereka. Pinang mampu menjembatani cinta di antara anak dan orang tua walaupun mereka telah terpisah ruang dan waktu. Pada umumnya, kepemilikan lahan kebun atau sawah bersifat turun-temurun sehingga menciptakan ikatan yang sangat kental antara pemilik dan lahannya. Bagi sebagian orang, kepemilikan lahan menjadi simbol kebanggaan primordial yang menandakan identitasnya sebagai penghuni asli di wilayah tersebut. Selain itu, menurut mereka, jarang sekali penduduk yang merantau ke luar daerah. Hanya sebagian kecil saja penduduk yang pindah atau merantau karena berbagai alasan, misalnya karena pekerjaan (menginginkan kehidupan yang lebih baik) atau karena perkawinan yang mengharuskan mereka pindah ke tempat lain.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian Versi Lokal

Kegiatan sensus yang dilakukan secara serentak pada tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar memberikan kesan tersendiri bagi penulis. Demikian halnya dengan tenaga pencatat atau pendata yang mungkin memiliki lebih banyak kisah. Bisa jadi kesannya menarik, menggelikan, mengharukan, dan berbagai kesan lainnya. Tulisan ini menjadi salah satu bentuk perekaman sekilas bagaimana penggalan data

yang dilakukan para petugas sering menghadapi situasi yang belum terbayangkan pada saat pelatihan atau pembekalan. Ketika penulis terjun ke lapangan, penulis hadir bersama beberapa orang PPL, PML, Koseka, koordinator sensus, dan Kepala BPS Kabupaten.

Berdasarkan hasil perbincangan dengan beberapa elemen pelaku pencacahan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu kepala BPS Kabupaten, Koseka, beberapa PML, dan PPL serta beberapa hari ikut mendampingi kegiatan pendataan di lapangan dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Aceh Besar berjalan cukup lancar, meskipun terdapat kesulitan di awal. Menurut para PPL, daftar isian yang mereka pegang terkesan kaku karena formatnya memang bersifat formal dan berlaku secara nasional. Perlu dibuat format daftar isian yang mampu beradaptasi dan mengakomodasi fakta data yang diperoleh. Hal ini karena satuan ukuran yang dipakai petani dalam menggambarkan besaran hasil produksi mereka tidak selalu sama. Sering keluar kata sekarung atau dua karung, sepetak dua petak, dua kaleng atau empat kaleng ketika mereka merepresentasikan luas lahan yang dimiliki atau digarap, berapa banyak pupuk, atau obat-obatan yang digunakan.

Ukuran kepemilikan lahan yang bersifat turun-temurun juga sering kali tidak menjadi perhatian petani. Mereka hanya tahu luas lahan yang dimiliki atau digarap berdasarkan batas-batas tertentu, misalnya pohon pinang, pohon kelapa, dan sebagainya, atau sungai atau kali yang melewati kebun mereka. Petani jarang sekali membuat batas tegas seperti pagar. Mereka percaya bahwa lahan mereka tidak akan diserobot. Oleh karena itu, ukuran versi lokal ini mesti dikonversi ke dalam hitungan standar baku yang berlaku umum. Berbeda halnya ketika mereka melakukan pendataan terhadap unit usaha tani tertentu yang berbadan hukum seperti sebuah perusahaan yang lebih terorganisasi, hitungan matematis relatif mudah diperoleh karena unit usaha yang didata memiliki sistem perhitungan administratif yang lebih terinci.

Dalam kasus lain, ditemukan ketidaksesuaian antara pertanyaan dan pilihan jawaban, misalnya untuk isian komoditas musiman di-

beri pilihan satu tahun terakhir penanaman dan dipanen sekarang, sedangkan petani menanam cabai tersebut dua tahun ke belakang dan baru dipanen sekarang. Akhirnya, permasalahan-permasalahan tersebut dikonsultasikan ke pihak penanggung jawab sensus provinsi untuk dimintai solusinya.

Beberapa kondisi eksternal di lapangan kadang tidak terprediksi sebelumnya. *Pertama*, akses lokasi pendataan yang susah dilewati sepeda motor. *Kedua*, responden enggan didatangi sehingga PPL harus menjelaskan secara jernih maksud dan tujuan pendataan. *Ketiga*, waktu kunjungan yang kadang harus dilakukan pada malam hari mengingat para petani bekerja dari pagi sampai sore. *Keempat*, sikap resisten penduduk yang merasa *risih* ketika ditanya. PPL dan PML harus sigap menyikapi kondisi ini. Kesulitan lain yang dialami para PPL adalah ketika usaha tani dijalankan bersama oleh orang tua serta anak yang telah berkeluarga dan tinggal dalam satu atap. Siapa yang mesti mengisi datanya? Di dalam format isian, kepala keluarga dan kepala rumah tangga merupakan entitas yang berbeda, sedangkan isian usaha produktif mesti merepresentasikan satu unit rumah tangga ekonomi yang memiliki unit usaha tani, ternak, ataupun perikanan. Ditambah tidak adanya administrasi formal terkait pengelolaan uang usaha yang sering kali tidak bersekut dengan uang untuk konsumsi keluarga sehari-hari kian mempersulit kerja PPL. PPL dituntut untuk membuat alur logis dari sebaran informasi yang tidak terakomodasi secara baku dalam format isian supaya datanya kalkulatif dan masuk akal. Tindakan tersebut tetap disertai dengan adanya pendampingan dan konsultasi dengan PML yang menjadi petugas pemeriksanya (lihat Gambar 2.3).

Lama kelamaan, kendala-kendala yang dialami PPL bisa teratasi. Setiap hari PPL belajar dari setiap proses pendataan yang dilakukan. Awalnya proses pendataan bisa berlangsung lebih dari satu jam, terlebih bila si responden memiliki banyak unit usaha produksi dari berbagai sektor pertanian. Peribahasa *bisa karena biasa* lumrah dijumpai dalam kegiatan pendataan yang dilakukan PPL. Lama kelamaan proses pencernaan informasi yang diperoleh relatif lebih



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.3 Diskusi PPL, PML, Koseka, dan Penanggung Jawab Sensus

mudah diakomodasi, konversi hitungan lokal menjadi baku cepat ditanggapi, siapa yang mesti didata cepat disikapi oleh PPL.

Sikap resistensi penduduk terhadap pendataan yang dilakukan adalah sebagai ekspresi ketidakpercayaannya terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Para PPL harus memberikan penjelasan secara jelas kepada penduduk. Jika penjelasan petugas PPL belum memuaskan, biasanya petugas PML yang turun untuk memberikan penjelasan kepada penduduk. Citra petugas yang melakukan pendataan sering dilabeli sebagai bagian dari aparat pemerintah yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Secara sederhana, ada anggapan bahwa *pemerintah sama dengan pemberi bantuan*. Jadi, ada kesan kalau tidak ada bantuan, kami tidak berharap Anda datang ke sini hanya untuk bertanya-tanya saja. Kesan seperti ini membuat petani atau siapa pun yang didata merasa perlu menampilkan 'sisi lain' dari realita yang dihadapi petani. Kebanyakan petani berpikir bahwa sensus pertanian sebagai cara untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, petani kerap memanipulasi informasi dalam kalkulasi pengisian data sensus pertanian. Hal ini dilakukan

oleh petani agar dapat terkategori sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Akhirnya, mereka pun sangsi dengan hasil data yang akan diolah oleh PPL nantinya.

Apa pun jawaban yang diberikan penduduk kepada PPL, Sensus Pertanian 2023 ini menjadi momen penting yang strategis dalam menyampaikan berbagai permasalahan petani selama ini. Data numerik yang dicatat dalam formulir menjadi wakil nyata nasib para petani. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan masih rendah, mereka masih menyalakan asa bahwa negara akan hadir ketika mereka menangis. Mereka mempertanyakan mengapa negara tidak hadir ketika harga-harga komoditas pertanian atau perkebunan turun, mereka mengeluhkan mengapa harga pupuk dan sarana produksi lainnya terus meningkat sementara harga jual produk pertanian tidaklah demikian, harganya terus terombang-ambing turun naik bak gelombang di tengah lautan. Mereka tetap berharap pemerintah memiliki kepekaan dan keberpihakan yang nyata terhadap nasib petani, minimal pemerintah hadir untuk memproteksi harga komoditas yang ditawarkan petani.

D. Menapaki Jejak Langkah Petugas Pendataan di Lapangan

Terdapat tiga petugas penting dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, yaitu PPL, PML, dan Koseka. Para PPL dan PML berada di garda terdepan dalam menggali informasi di lapangan. Sebelum menjadi bagian dari kegiatan Sensus Pertanian 2023, PPL dan PML sudah memahami rintangan yang akan dihadapi. Sebagian besar mereka pernah terlibat dalam Sensus Registrasi Sosial Ekonomi (Sensus Regsosek). Mereka dianggap sebagai mitra oleh BPS dan ditawarkan kembali untuk bergabung dalam Sensus Pertanian 2023, terutama untuk mereka yang memiliki kinerja baik. Selebihnya adalah petugas yang baru bergabung. Honor yang diterima menjadi salah satu daya tarik untuk bergabung. Mereka rata-rata berusia muda dan cekatan di lapangan. Terlihat perbedaan antara PPL yang telah menjadi mitra sebelumnya dengan PPL yang baru bergabung. PPL yang sebelumnya terlibat

dalam Sensus Regsosek relatif lebih mudah memahami daftar isian dan melakukan input data berdasarkan kode jawaban yang tersedia. Itu sebabnya supervisi PML sering dilakukan untuk memantau jalannya pendataan. Pemantauan dilakukan untuk menghindari kesalahan penginputan kode agar tetap sesuai dengan alur logis pertanyaan yang ada. PPL tidak hanya melakukan koordinasi dengan PML dan Koseka, tetapi juga dengan penanggung jawab sensus kabupaten (PIC).

Tangkapan indra penulis yang membawa tema narasi emik terkait pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 tentu akan berbeda dengan tangkapan indra para pelaksana pendataan di lapangan. Penulis mencoba menyelami vibrasi dalam proses pendataan PPL. Setiap ekspresi yang ditampilkan PPL atau responden menjadi pesan terselubung yang harus dibuka. Inilah saatnya hasil pelatihan di kelas pembekalan berhadapan dengan situasi nyata di lapangan.

Perekrutan PPL dan PML melalui media sosial dianggap sangat efektif karena pesan tersebar secara berantai. Mitra BPS yang sebelumnya terlibat dalam Sensus Regsosek ikut menyebarkan informasi ke para kerabat, teman dekat, tetangga, dan seterusnya. Untuk Kabupaten Aceh Besar terdapat 12 orang Koseka yang merupakan pegawai BPS Kabupaten Aceh Besar dan 43 orang PML (satu PML membawahi lima sampai enam PPL dari total 256 orang PPL). PPL mesti mengejar target kuota responden selama dua bulan. Rata-rata PPL menargetkan 200 responden yang memiliki unit usaha produktif berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan.

PPL tidak hanya menggali data ke unit usaha rumah tangga atau perseorangan, tetapi juga terhadap unit usaha yang berbadan hukum, seperti perusahaan perkebunan, perusahaan peternakan sapi atau ayam, dan lain-lain. PPL bertanggung jawab menghasilkan data akurat atau valid sesuai kriteria BPS. PPL harus mampu menerjemahkan informasi dan mengolahnya secara logis menjadi data yang representatif. Olahan data yang tertangkap di-input dan diperiksa oleh PML. PML sebagai petugas pemeriksa, harus mampu mengawal dan memberikan solusi demi kelancaran proses pendataan. Mereka menjadi konsultan langsung PPL di lapangan.

Pemanfaatan aplikasi pendataan BPS berbasis GPS telah memudahkan kegiatan pendataan. Namun, terkadang akurasi peta yang dijadikan acuan tidak dipahami secara tepat oleh PPL sehingga terjadi kesalahan pengambilan batas wilayah pencacahan. Solusi yang dipilih adalah PPL berkoordinasi dengan pihak desa dalam menyesuaikan penentuan batas-batas administrasi desa dengan peta yang dipegang PPL. Ketika jaringan internet di suatu lokasi pendataan kurang bagus, proses tersebut mereka lakukan setelah semuanya selesai.

PPL harus mampu menyampaikan daftar isian pertanyaan secara jelas dan mudah dipahami oleh responden yang sebagian besar adalah laki-laki sebagai kepala keluarga petani (lihat Gambar 2.4). Pertanyaan yang disampaikan PPL harus mengikuti ritme pengetahuan yang dimiliki responden, kebiasaan, dan pola budaya yang berlaku di lokasi pendataan. Kemampuan menerjemahkan bahasa nasional ke dalam bahasa lokal menjadi salah satu alat yang memudahkan penyampaian maksud pertanyaan PPL terhadap responden. Dengan catatan, PPL sudah memahami secara *kaffah* instrumen pertanyaan dalam daftar isian. Sepulang dari lapangan, PPL harus mengecek kembali hasil pendataan, jangan sampai terjadi kesalahan. Jika terdapat kesalahan penginputan data, mereka harus kembali ke responden.



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.4 Proses Pencacahan Keluarga Petani dengan Responden Suami sebagai Kepala Keluarga

Saat ini, tuntutan publik terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang betul-betul berbasis pada bukti (*evidence-based policy*) yang salah satu buktinya diperoleh dari kegiatan Sensus Pertanian 2023. Data yang terkumpul harus benar-benar akurat. Kesalahan PPL dalam mentransfer kalimat ke dalam bahasa lokal akan berakibat pada akurasi informasi yang diperoleh. Kesalahan tersebut akan berimbas pada kesalahan pencatatan informasi, pengambilan tindakan, bahkan berdampak luas terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya. Oleh karena itu, PPL dan PML sebaiknya berasal dari daerah yang sama dengan tempat pendataan dilakukan. Beda desa mungkin tidak masalah, asalkan latar belakang kulturalnya tidak jauh berbeda dengan daerah asal responden.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan: Menanam Pinang di mana pun Jadi Asal Harganya Tinggi

Ketika berbicara *petani*, berarti kita juga sekaligus berbicara tentang *lahan*. Lahan ibarat jati diri petani. Ketika jumlah penduduk belum begitu banyak, mungkin lahan tidak menjadi masalah. Semakin bertambah jumlah penduduk, makin banyak ruang hidup yang dibutuhkan dan makin banyak masalah yang ditimbulkan. Beberapa kasus konflik lahan yang disengketakan, konversi hutan atau lahan produktif lainnya menjadi potret dari sekian masalah yang muncul ke permukaan. Lahan produktif seperti sawah menjadi bahan perhatian ketika banyak yang dikonversi atas nama pembangunan, yang tentunya akan berdampak pada ketahanan pangan itu sendiri. Kondisi inilah yang terjadi di wilayah Aceh Besar. Lokasinya yang berdekatan dengan ibukota Provinsi Banda Aceh menyebabkan banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi permukiman baru, pertokoan, dan sejumlah fasilitas publik lainnya (Hanafiah, 2022).

Kemudahan tempat tumbuh tanaman pinang membuat petani tidak terlalu pusing dengan ketersediaan lahan. Pinang bisa tumbuh di mana saja, baik di kebun maupun di pekarangan rumah. Umumnya,

pinang ditanam di kebun bersama dengan komoditas lain, seperti tanaman buah, sayuran, kelapa, dan lain-lain. Bagi petani yang tidak memiliki lahan yang luas, mereka masih bisa menanam tanaman ini di pekarangan rumah. Selain mudah ditanam di mana saja, alasan petani menanam pinang karena potensi harga jualnya yang tinggi. Namun, mereka menyadari harga yang tinggi tidak akan berlangsung selamanya, sering pula harganya turun terlebih ketika menjelang lebaran. Pada momen ini, tidak hanya pinang, komoditas kebun lainnya pun ikut turun seperti sawit.

Dilihat dari luas lahan dan jumlah produksi pinang, Kabupaten Aceh Besar tidak berada di posisi pertama, tetapi juga tidak berada di posisi terakhir (lihat Tabel 2.1). Komoditas unggulan pertanian dari sektor perkebunan di Aceh Besar justru adalah kelapa yang memiliki lahan terluas sebesar 12.575,78 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023). Usaha pinang di Aceh Besar bisa dikatakan hanya sebagai bagian dari usaha perkebunan rakyat. Meskipun demikian, bukan berarti pinang tidak berarti. Pinang tetap ada di hati petani terlebih ketika harganya tinggi. Jejeran pohon pinang mudah kita temui sepanjang jalan yang dilewati. Tidak seperti tanaman padi yang membutuhkan area tanam khusus dengan perawatan yang sangat hati-hati.

Kebiasaan petani menanam berbagai tanaman produksi dalam satu lahan adalah hal yang lumrah. Menurut petani, kelumrahan ini di samping sebagai kebiasaan juga sebagai bentuk strategi adaptasi petani dalam menyikapi keterbatasan lahan yang dimiliki. Tanaman pinang, kelapa, tanaman buah, sayuran, dan lain-lain hidup berdampingan di area yang sama. Bahkan di beberapa lokasi yang disambangi penulis, tanaman pinang ditanam secara rapat. Sejatinya, untuk menanam pinang yang berbuah banyak dan masa produktif yang lebih lama dibutuhkan jarak tanam ideal sebesar 3 x 3 m (Panduan lengkap budidaya pinang betara, t.t.). Sebagai informasi, kegiatan bertani di kebun, ladang, atau sawah, sebagian besar didominasi oleh laki-laki; terutama mereka yang sudah berumah tangga dan menjadi pencari nafkah utama. Begitupun dalam melakukan kegiatan usaha berbasis budi daya pinang, laki-lakilah yang dominan. Dalam hal-hal tertentu

saja perempuan (istri) dan anak-anaknya ikut membantu, terutama dalam kegiatan yang tidak membutuhkan energi besar, seperti menjemur biji pinang, memungut pinang yang berjatuhan di area sekitar kebun, dan sebagainya.

Berkurangnya luas lahan pertanian diakui petani sebagai dampak perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bangunan dan permukiman akibat penambahan penduduk, baik yang terjadi secara alami maupun migrasi. Besaran luas lahan pertanian menurut mereka memang berpengaruh terhadap potensi hasil produksi yang akan diperoleh, tetapi kemampuan memaksimalkan potensi lahan, walaupun kecil, jauh lebih utama. Bagi mereka, meskipun lahan yang dimiliki kecil, yang terpenting adalah bagaimana lahan tersebut memberi arti dan memberikan dampak positif dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Secara rasional, mereka mengakui makin besar luasan lahan yang dimiliki, makin besar pula potensi ekonomi yang akan didapati. Namun, semua kembali ke bagaimana petani memperlakukan dan memanfaatkan lahannya. Dalam konteks ini, lahan dilihat dari sisi kegunaannya sebagai nilai personal yang diperoleh dari kegiatan yang berorientasi ekonomis yang sejatinya lahan pun memiliki manfaat lain yang lahir sebagai bawaan yang ada dengan sendirinya (Irawan B., dalam Husna et al., 2018).

Di Kecamatan Montasik, ketika penulis ikut mendampingi PPL, status lahan pada umumnya adalah milik pribadi petani yang lazim diperoleh secara turun-temurun. Di desa tersebut, jarang terdengar ada lahan yang disewakan. Kalaupun ada, sifatnya hanya memanfaatkan lahan milik sanak saudara atau kerabat. Lahan yang dimanfaatkan pada umumnya adalah tanaman padi sawah atau tanaman musiman. Modal berasal dari pengguna lahan, sifatnya bagi hasil setelah dikurangi modal yang telah dikeluarkan pengguna lahan.

F. Bergerak Tanpa Maju: Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian

Menurut hemat penulis, ketika membahas tentang para petani pinang di Aceh Besar, tidak bisa hanya berbicara tentang nasib petani pinang

itu sendiri yang terpisah dari ragam variabel lain yang saling terhubung dalam konstelasi usaha berbasis pertanian atau perkebunan lainnya. Sama halnya seperti gambaran tanaman pinang yang tumbuh di lahan pekarangan atau kebun dengan berbagi tempat dengan tanaman lainnya. Perkebunan pinang yang dikelola oleh penduduk di Aceh Besar bercirikan perkebunan rakyat. Sejak puluhan tahun yang lalu, Ertherington dalam Firmanda et al. (2022) menyatakan bahwa perkebunan rakyat memiliki ciri sebagai berikut: (1) luas areal yang diusahakan kecil dan bersifat perorangan; (2) teknologi yang digunakan masih sederhana dan tradisional; (3) lemah dalam permodalan dan pemasaran; serta (4) produktivas dan kualitas produk masih rendah. Masalah ini kerap dijumpai petani ketika berproduksi. Selain itu, kelembagaan tani yang ada tidak bergerak secara optimal dan rantai niaga yang tidak pro pada petani menjadi bagian dari masalah yang hadir mengiringi.

Beberapa ciri di atas terlihat ketika kita intip apa yang sedang terjadi di ruang usaha pinang saat ini. Sebagian besar petani pinang di Aceh Besar mengelola usaha tani secara konvensional, seperti kebiasaan menanam tanpa menggunakan jarak tanam ideal 3 m x 3 m (lihat Panduan lengkap budidaya pinang betara, t.t.) serta jarang melakukan pemupukan dan pembersihan lahan. Ketika melakukan penanganan pascapanen, teknologi yang digunakan masih sederhana, misalnya dalam proses pengupasan kulit pinang masih manual tanpa menggunakan alat pengupas dan pengeringan buah masih mengandalkan sinar matahari. Rangkaian proses, mulai dari budi daya hingga pascapanen masih bertumpu pada pengetahuan yang diperoleh dari para pendahulunya. Statusnya sebagai tanaman pekarangan atau kebun yang diwarisi dan bagian dari amanat keluarga yang perlu dilestarikan.

Mungkin kasusnya berbeda ketika berhadapan dengan petani besar atau mereka yang memiliki modal lebih yang mampu mengelola lahannya dengan baik dan sangat mudah pula melengkapi peralatan teknologi untuk mendukung dan mendayagunakan potensi lahan. Rendahnya tingkat pendidikan petani, keterbatasan dalam hal per-

modalan dan akses terhadap informasi terkini disinyalir sebagai sekian dari penyebab rendahnya pemanfaatan ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam membudidayakan tanamannya.

Berdasarkan permasalahan aktual yang terjadi pada usaha budi daya pinang saat ini diperoleh gambaran yang lumayan miris terutama pada saat kegiatan penarasian emik Sensus Pertanian 2023. Harga biji pinang mengalami penurunan yang sangat drastis. Pinang pernah dihargai Rp3.000/kg di tingkat petani. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pinang dapat mencapai kisaran harga Rp15.000/kg, sedangkan di tingkat pengumpul harganya Rp7.000-an/kg. Menurut seorang pengumpul, penurunan harga pinang di pasaran terjadi sejak Januari 2022 sampai sekarang, dan fenomena tersebut dianggap biasa terjadi terutama menjelang lebaran dan berlaku hampir untuk semua komoditas perkebunan lainnya seperti sawit. Bagi petani yang sebagian besar memiliki keterbatasan dalam mengkases informasi secara utuh, mereka hanya memperoleh informasi penurunan harga tersebut dari para pengumpul atau dari sesama petani itu sendiri. Ketika ditanya penyebab penurunan harga pinang secara pasti mereka tidak bisa memberikan penjelasannya secara utuh. Mereka hanya bisa menduga penurunan harga pinang mungkin disebabkan oleh berkurangnya minat pembeli untuk membeli pinang dari wilayah Aceh. Dugaan ini diperkuat kembali oleh seorang pengumpul pinang lokal yang menyatakan kalau saat ini banyak pembeli yang mengalihkan lokasi beli produk ke daerah luar dan menyebabkan permintaan pinang dari Aceh menurun. Namun, alasan mengapa banyak pembeli yang mengalihkan sumber beli produknya tidak diketahui secara pasti. Sebagai tambahan, di dalam sebuah artikel yang dipublikasi di media *online* diperoleh informasi penting bahwa fenomena penurunan harga pinang disinyalir karena India sebagai salah satu negara tujuan ekspor pinang memberlakukan proteksi produk barang dari luar dengan meningkatkan pajak barang yang masuk ke negaranya hingga 108% dan Indonesia tidak memiliki kerja sama dagang dengan India (Juli, 2023). Tentunya kondisi ini menyebabkan produk pinang dari Indonesia sulit menembus pasar India. Bagi petani yang memiliki

sumber daya komoditas lain, penurunan harga produk tidak terlalu berpengaruh meski tetap menangis sambil optimis menunggu harga naik kembali. Mereka tidak terlalu khawatir karena buah pinang dapat disimpan selama satu tahun ke depan.

Dua tahun ke belakang, usaha budi daya pinang sangat menjanjikan, potensi pasar ekspor yang demikian tinggi mendorong pemerintah daerah Provinsi Aceh menempatkan pinang sebagai komoditas yang terus dikembangkan. Saat itu, pengembangan wilayah penanaman dan pemberian bibit unggul kepada petani kerap dilakukan oleh Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Aceh. Usaha tani berbasis pinang menggairahkan dan memberi penghasilan yang lumayan tinggi. Hal ini merupakan tindak responsif pemerintah dalam mendorong penanaman bibit unggul menjadi program peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Keadaan menjadi berbalik ketika harga pinang anjlok di seluruh wilayah Aceh termasuk di Aceh Besar. Petani enggan menjual pinangnya. Jangankan menjual pinang, mengupas kulitnya pun mereka enggan.

Mekanisme penjualannya sebenarnya tidak sulit. Petani memasarkan atau menjual langsung ke para pedagang pengumpul atau *tauke* yang siap hadir membeli produk dari petani. Selama beberapa lama usaha tanam pinang ini sangat menjanjikan, harga biji pinang di tingkat petani lumayan tinggi, karena permintaan dari luar negeri cukup besar. Menurut petani, biji pinang ini berguna untuk industri tekstil dan bahan baku dasar pewarna, tetapi bagi para petani pinang, informasi peruntukannya untuk apa tidak terlalu banyak dipikirkan selama harga yang diberikan tetap tinggi. Para pedagang pengumpul, baik lokal maupun dari luar daerah—paling banyak dari Medan—sering datang membeli produk dari wilayah Aceh Besar ini. Harga biji pinang di tingkat petani memuaskan petani waktu itu ketika harga sedang tinggi, bahkan konon ada petani pinang yang berhasil naik haji gara-gara bertani pinang. Meskipun petani mengakui pihak yang paling diuntungkan dari bisnis pinang ini adalah mereka yang berperan sebagai pedagang pengumpul, *tauke*, atau *buyer* (apa pun istilahnya), tetapi minimal mereka dapat mencicipi buah hasil budi

daya tanaman pinang. Namun, di sektor hilir, ketidakberdayaan petani dalam bertransaksi untuk menentukan harga produksi menjadi potret umum yang kerap dijumpai (Utomo et al. dalam Firmanda et al. 2022). Tengkulak atau pedagang pengumpul lebih dominan dalam menentukan harga produksi. Terjadi ketimpangan dalam mata rantai produksi. Pembagian rezeki tidak sebanding dengan risiko yang dimiliki (Supriyadi, 2021). Tentunya hal ini menjadi masalah yang terus terjadi pada seluruh komunitas petani, termasuk petani pinang. Petani dan pengumpul seolah tidak dapat dipisahkan, kehadiran mereka tetap dinanti meski harga yang diberikan pengumpul tidak sesuai harapan petani. Kehadiran pengumpul pelan-pelan terlegitimasi tanpa harus menggunakan perjanjian khusus secara hukum.

Dalam berbagai artikel, tengkulak, pedagang pengumpul, pembeli dan berbagai penamaan lainnya disinyalir sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam menciptakan keterpurukan petani (Megasari, 2019). Namun, selama belum ada lembaga resmi yang nyata berpihak terhadap petani, selama itu pula petani akan tereliminasi dan tidak terlegitimasi dalam ruang kultur yang ada. Hubungan antara petani dan pengumpul lebih banyak berdasarkan sikap saling percaya. Patut diakui memang jika para pengumpul, tengkulak, atau *tauke* (dalam bahasa setempat) selalu cepat tanggap terhadap petani. Minimal mereka langsung membeli pinang petani tanpa menunggu esok hari. Bagi petani, terutama yang memiliki lahan di bawah 1 ha, hal paling penting adalah *ada uang ada barang*. Bagi petani, memperoleh bayaran langsung tunai tanpa harus menunggu lebih dipilih ketimbang sabar menunggu bayaran. Kasusnya akan berbeda bila petani memiliki lahan yang luas, atau memiliki sumber penghasilan lain selain bertani. Mereka bisa lebih sabar menanti bayaran karena masih bisa memperoleh penghasilan dari komoditas lain yang dimiliki. Para tengkulak atau pedagang pengumpul yang memiliki modal besar bahkan berani memberi uang terlebih dulu ke petani sebagai bagian upaya mereka melanggengkan kepercayaan petani.

Masalah-masalah di atas saling jalin berkelindan secara kompleks dan akhirnya memosisikan para petani dalam keadaan inferior. Para

petani tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menempatkan diri secara proporsional dalam peta tata niaga perkebunan tanaman pinang. Potensi bisnis pinang yang kerap digadang-gadang dapat memberikan penghasilan yang menggiurkan nyatanya tidak dapat dinikmati hasilnya oleh para petani secara sempurna. Gairah usaha pinang yang baru merangkak berdiri belum menciptakan usaha yang stabil dan berkelanjutan, terlihat dari harganya yang liar tak terkendali hingga hari ini. Jaminan keberlangsungan usaha yang stabil sangat dinanti petani karena jelas usaha ini memberikan peluang baik untuk petani. Mereka yakin jika harga produksi stabil, pasti mereka akan menata diri, mulai dari perbaikan lahan produksi, menggunakan teknologi terkini, dan memperbaiki kualitas yang dihasilkan.

Banyak pakar, akademisi, maupun praktisi yang menyuarakan pentingnya kelembagaan yang kuat dan operasional dalam memperkuat daya tawar petani dalam peta tata niaga pertanian. Tema pemberdayaan menjadi kunci penting yang terus didengungkan demi tegaknya keadilan dalam dunia pertanian terkhusus untuk petani dengan jalan memperkuat kelompok masyarakat yang dianggap lemah (Riza et al. dalam Pradiana & Anantanyu, 2022). Menurut Parma (2014), kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan posisi tawar petani sehingga mereka lebih kompetitif. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi petani tidak muncul secara tunggal, tapi hadir secara kompleks berkelindan dengan beragam aspek, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai program pembangunan sudah banyak dilakukan pemerintah sejak republik ini berdiri. Revolusi hijau adalah hasil penancangan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan supaya dapat diterapkan dalam setiap gerak langkah kegiatan pertanian, sehingga kita mengenal istilah *intensifikasi pertanian*, *ekstensifikasi pertanian*, *swasembada*

pangan, dan istilah-istilah lainnya yang lahir bertepatan dengan pembangunan pertanian dilaksanakan. Program-program pembangunan demikian diakui telah membawa perubahan dalam tatanan pertanian di Indonesia, produktivitas dan tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan sampai pada masa-masa tertentu.

Lama-kelamaan, maraknya pelaksanaan pertanian modern melalui semangat revolusi hijau menunjukkan arah yang berbeda dari apa yang dimaksudkan dan ditujukan sedari awal. Intensifnya pemberian pupuk, obat-obatan, dan eksploitasi lahan secara masif dalam jangka panjang akhirnya berdampak besar pada penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan), mulai dari tanah, air, udara sampai makhluk hidup yang tinggal di dalamnya (Wulansari, 2019). Akhirnya, revolusi hijau mulai banyak ditentang beragam kalangan karena disinyalir menjadi salah satu faktor yang ikut mendegradasi lingkungan. Tidak sampai di situ saja, revolusi hijau pun telah melahirkan realita kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi akibat adanya praktik-praktik ekonomi yang tidak menguntungkan bagi sebagian pihak (Lagiman, 2020). Patut diakui, di satu sisi, modernisasi pertanian memang telah berperan dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi di sisi lain justru melahirkan kondisi yang sudah disebutkan di atas. Tak heran bila sekarang kita sering mendengar keluhan petani terkait kesuburan lahannya yang menurun dan selalu membandingkannya dengan kondisi dulu, serta bagaimana mereka harus dapat bertahan hidup dengan hanya mengandalkan hidup dari pertanian. Namun, menurut petani, praktik pertanian secara organik diperlukan modal yang relatif lebih besar dibanding penggunaan pupuk buatan (kimia), ditambah ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk buatan sudah sangat tinggi karena sifatnya instan dengan hasil panen yang lebih banyak. Mungkin bagi petani yang memiliki modal besar, lahan yang luas, dan punya jejaring yang kuat dalam peta usaha tani, praktik pertanian organik bisa menjadi pilihan yang diambil dengan pertimbangan harga jual produk lebih tinggi, dan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih lestari.

Berdasarkan kondisi tersebut, tercipta kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan keadilan hingga berlanjut dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Istilah *pertanian berkelanjutan* adalah pengejawantahan semangat dalam menjaga sistem pertanian yang dapat bertahan hingga masa depan. Ini artinya setiap praktik pertanian mesti diiringi dengan semangat menjaga sumber daya lahan agar tetap lestari dan terus memberikan manfaat sampai generasi berikutnya. Lebih lanjut, Lagiman (2020) menyebutkan pembangunan bisa disebut mengandung keberlanjutan bila:

1. secara ekonomi terdapat praktik-praktik yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan pemanfaatan sumber daya dan investasi secara efisien;
2. secara ekologis terdapat upaya pemeliharaan sumber daya alam termasuk dalam penjagaan keanekaragaman hayati dan;
3. secara sosial, terdapat praktik-praktik yang dapat mendorong terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial dan pengembangan kelembagaan.

Pembangunan pertanian berkelanjutan sudah pasti akan berlandaskan tiga aspek utama tersebut yang diimplementasikan secara komprehensif, pun demikian dalam penerapan kebijakan dan program-program pertaniannya. Praktik pertanian berkelanjutan membutuhkan upaya yang terus-menerus, tidak berhenti hanya sebatas respons terhadap isu-isu yang berkembang secara global.

Praktik di lapangan, sering kali petani menghadapi situasi yang *melelahkan*. Sistem pertanian organik merupakan salah satu dari sekian praktik pertanian berkelanjutan (Rachma dan Umam, 2020; Lagiman, 2020). Penerapannya di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengajak mereka untuk beralih ke sistem organik ibarat menghadapi tembok tebal. Situasi yang dihadapi adalah entitas yang sudah lama terdistorsi oleh intensifnya penerapan gagasan modernisasi pertanian selama puluhan tahun. Akumulasi pembiasaan dan kebiasaan yang sudah terbentuk selama puluhan

tahun dalam memodernkan praktik pertanian di Indonesia berujung pada keadaan di mana petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemanfaatan produk teknologi pertanian, seperti pupuk dan obat-obatan kimia buatan. Ketika petani diimbau, diajak, dan dikenalkan dengan praktik pertanian organik, sedikit banyak mereka akan resisten, menolak secara halus. Mereka berpikir berapa lama waktu dan modal yang harus dikeluarkan demi melakukan praktik pertanian secara organik ini. Praktik pertanian organik ini konon membutuhkan modal yang sangat tinggi, sedangkan petani sudah terbiasa melakukan praktik pertanian yang instan, cepat memperoleh hasil tanpa harus susah payah mengeluarkan energi lebih. Pun gagasan memaksimalkan peran kelompok tani dalam memobilisasi kekuatan supaya lebih mandiri dan kemampuan bertransaksi yang pada perjalanannya justru mengalami mati suri.

Gambaran di atas adalah salah satu rentetan peristiwa yang terpotret bagaimana kegagalan petani menyikapi isu-isu bernuansa keberlanjutan. Kegagalan ini bisa dikatakan sebagai buah hasil pembentukan persepsi yang sangat lama tentang bagaimana cara bertani melalui pemanfaatan teknologi yang berorientasi hanya dari sisi produksi. Komersialisasi berbasis produktivitas menjadi tujuan utama para petani tanpa memperhatikan bagaimana cara menjaga daya dukung lingkungannya supaya tetap lestari.

Kehadiran kelompok tani dan para petugas penyuluh belum mampu beroperasi sesuai tugas dan fungsinya yang mengatasmakan keberlanjutan karena masih banyak kendala yang dihadapi. Di lokasi pendataan, penulis memperoleh informasi bahwa keberadaan kelompok tani beroperasi secara administrasi ketika ada program dari pemerintah, baik dalam hal pemberian bantuan maupun pelatihan teknis tertentu. Kehadiran tenaga penyuluh pertanian lapangan kurang memberikan pendampingan secara paripurna. Mereka hadir saat memberikan informasi tentang program-program pertanian dari pemerintah atau ketika melakukan pendataan. Jika ada pembinaan, mereka lebih fokus ke komoditas tanaman padi. Sementara itu, komoditas pinang sebagai tanaman perkebunan yang notabene dianggap sebagai tanaman kuat, tanpa perlu ada perawatan ekstra

pun kurang memperoleh pendampingan. Pemberian bantuan berupa pupuk bersubsidi lebih banyak diserap oleh pertanian tanaman padi, yang secara administrasi untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini pun dianggap rumit oleh petani.

Tampaknya, perlu upaya serius untuk menghidupkan kembali ruh kelompok tani yang ada; perlu sinergitas antarpihak, baik dari pemerintah terkait, pihak swasta seperti penyedia sarana produksi pertanian atau lembaga keuangan, donatur/investor, maupun dengan kelompok masyarakat yang terlibat dalam usaha tani, baik dari kalangan petani maupun pedagang yang terhubung dalam rantai pasok usaha pertanian. Lembaga keuangan sebagai pemberi modal usaha bisa memberikan keleluasaan secara administrasi, tidak “ribet” berdasarkan kesepakatan tertentu ikut hadir mendukung dunia usaha tani supaya makin bergairah sehingga tidak terdengar lagi petani yang tidak punya modal akhirnya dia menggadaikan atau menjual lahannya kepada pihak lain, sedangkan mereka menjadi buruh di bekas lahannya sendiri. Tentu kejadian ini sangat lah miris dan tidak sesuai dengan cita-cita negeri ini, yaitu menyejahterakan petani dengan berbagai kebijakan dan program pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kelompok tani dapat berfungsi sebagai wadah penting dalam menjalankan dan menerjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh serta sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Operasionalnya kelompok tani dan maksimalnya peran petugas penyuluh lapangan dalam mendampingi petani, menjadi pintu masuk yang dapat dimaksimalkan ketika akan membangun fondasi tentang pentingnya keberlanjutan dalam menjalankan praktik pertanian berkelanjutan ini.

H. Produk, Pengelolaan Pascapanen dan Mata Rantai: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Bandel, mudah hidup dalam berbagai kondisi lahan, tidak manja adalah beberapa gambaran yang tepat untuk disematkan pada tanaman

pinang, minimal begitulah menurut mereka yang menanam pinang di Aceh Besar ini. Produktif, tidak tergantung pada pupuk itulah kata lanjutan lainnya. Oleh karena itu, tanaman ini amat disenangi petani, bahkan pegawai negeri yang tertarik untuk bertani. Pun demikian bagi para pemula yang akan memulai praktik bertani, pinang merupakan salah satu komoditas yang direkomendasi. Asalkan ada lahan yang bisa ditanami, sebisa mungkin orang akan menanam tanaman ini, tidak perlu lahan berupa kebun, pekarangan pun bisa ditanami asal memberi pendapatan yang pasti.

Pemanenan buah pinang dilakukan dalam dua cara; pertama, buah yang sudah matang atau setengah matang dipetik langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat pemetik (galah). Kematangan buah dilihat dari warna kulitnya, kuning kemerah-merahan adalah tanda kalau buah pinang sudah matang; kedua, mengumpulkan buah yang jatuh sendiri. Jika permintaan dan harga sedang tinggi, petani akan memetik buah tanpa menunggu jatuh sendiri. Pada umumnya praktik budi daya pinang di Aceh besar dilakukan secara konvensional mulai dari budi daya sampai penanganan pasca-panennya seperti yang sudah disebutkan di subbab sebelumnya.

Biji pinang yang sudah dikumpulkan kemudian dikupas kulitnya menggunakan pisau atau golok, dikeringkan di bawah sinar matahari, menggunakan alas tertentu seperti terpal. Penjemuran umum dilakukan di pekarangan rumah atau tempat tertentu yang sengaja dibuat sebagai tempat menjemur biji pinang. Biasanya petani jarang menggunakan alat pengering tertentu yang bisa digunakan kapan pun tanpa tergantung pada sinar matahari. Tanda buah pinang ini dianggap betul-betul bagus adalah ketika buahnya mengeluarkan suara dari dalam buahnya yang menandakan kalau bijinya telah terpisah dari kulitnya. Itulah momen ketika buahnya bisa dikupas, pengupasannya sebisa mungkin tidak sampai membuat bijinya rusak. Selain dengan cara dikupas, penanganan buahnya bisa dilakukan dengan cara dibelah menggunakan alat tertentu, lalu dijemur. Rata-rata proses penjemuran memakan waktu selama seminggu sampai dua minggu tergantung intensitas sinar matiharinya. Jika terik matahari-

nya tinggi, tidak ada hujan, pengeringannya bisa cepat dan tidak perlu menunggu sampai seminggu atau dua minggu. Setelah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam karung-karung, dikemas secara rapi lalu disimpan di tempat penyimpanan atau gudang yang kelembapannya terjaga agar buahnya tidak berjamur. Pengeringan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan biji pinang yang berkualitas. Menurut para petani, pengeringan buah pinang ini harus maksimal, betul-betul kering yang memungkinkan produknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama ketika disimpan.

Kegiatan di kebun (*on-farm*) biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, terutama suami sebagai pencari nafkah utama, mulai dari penanaman, pemupukan (walau jarang dilakukan), pembersihan gulma, hingga pemanenan. Kegiatan memanen utamanya dilakukan oleh suami selaku kepala rumah tangga, tetapi sering pula dibantu oleh istri dan anak-anaknya terutama ketika banyak biji pinang yang sudah jatuh ke tanah karena bijinya tinggal dipunguti saja. Kegiatan pascapanen (*off-farm*), seperti pengupasan dan pengeringan biji, umum dilakukan para istri, walaupun tidak jarang suami dan anak-anaknya pun ikut terlibat. Kadang keluarga petani akan membayar orang lain (tetangga atau kerabatnya) untuk melakukan pemanenan dan pengupasan dengan bayaran Rp2.000,-/kg ketika produktivitasnya sedang tinggi. Pengemasan dan penyimpanan biji pinang kembali dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan peran suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam pemasaran, suami yang lebih banyak berperan; biasanya suami sudah memiliki kenalan atau jaringan yang bisa mengakses penjualannya. Bagi keluarga petani, menjual biji pinang ke pedagang pengumpul adalah pilihan yang sangat mudah, mekanismenya bisa mereka jual ke pedagang penampung yang datang sendiri ke tempat di mana petani itu menyimpan biji pinangnya, atau mereka bawa langsung ke pasar untuk menjualnya. Namun, pilihan pertama adalah yang banyak dilakukan oleh petani.

Geliat usaha pinang yang makin bergairah pada saat itu (dua tahun sebelum harga anjlok) sampai-sampai pemerintah provinsi menempatkan pinang sebagai salah satu komoditas unggulannya.

Bantuan bibit pinang dan pupuk disebar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh ke beberapa kelompok tani yang tersebar di kecamatan Provinsi Aceh besar ini tujuannya adalah untuk menggenjot produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani. Namun, terbatasnya lahan yang dimiliki petani, akses terhadap harga dan situasi pasar terkini, ditambah rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pasca panen menjadi sekian dari deretan permasalahan yang dihadapi petani saat ini. Prospek bisnis budi daya pinang memang menjanjikan, meskipun situasinya selalu turun-naik mengikuti harga dan permintaan yang ada. Kehadirannya akan selalu ada di hati para petani yang menempatkan pinang sebagai bagian dari elemen penting ekonomi keluarganya. Bagi petani yang memiliki sumber daya komoditas lain, turunnya harga produk tidak terlalu dirisaukan meski mereka tetap menangis sambil tetap optimis kalau harganya bisa segera naik kembali. Mereka tidak terlalu khawatir kalau buahnya disimpan lama selama satu tahun ke depan. Buah pinang ini termasuk awet bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama asal tidak di atas satu tahunan supaya tidak berjamur. Dapat dikatakan jika pohon pinang ini berperan sebagai tabungan atau cadangan demi menunjang perekonomian keluarga yang kapan pun bisa mereka jual meski harga sedang murah.

I. *Life Story*: Sepintas Kisah di Balik Praktik Usaha Budi Daya Pinang

Sudah disinggung sebelumnya bahwa kemudahan memelihara tanaman pinang, hasilnya yang menggiurkan, produktif setiap bulan, dan tidak repot dalam urusan lahan untuk menanam, menjadi beberapa dari sekian alasan penduduk di Aceh Besar ini untuk menanamnya. Alasan ini pulalah yang membuat beberapa keluarga petani tetap memeliharanya meski harga sedang tidak tinggi.

Cerita menarik dan mengharukan akan selalu hadir mengisi kehidupan petani. Kisah menggembirakan kita dengar ketika ada seorang petani pinang yang berhasil meraup rezeki yang lumayan tinggi dari usaha budi daya pinang yang dimiliki. Harga tinggi akan

selalu dinanti petani, Ketika harga tinggi mereka akan serius mengurus lahannya, minimal gulma dicabut-cabuti.

Tersebutlah ada satu keluarga petani yang bisa pergi menunaikan ibadah haji dengan menjual hasil panen dari pinang. Petani tersebut sangat serius menanam pinang sampai ribuan pohon di atas lahan tiga hektar di samping komoditas lain yang ditanam. Sudah lebih dari sepuluh tahun petani tersebut berbudi daya pinang, keluarga ini tidak memiliki lahan tanam padi. Mereka hanya memiliki lahan kebun, di mana pinang menjadi salah satu komoditas utama yang dapat membuat periuk nasi tetap berisi. Beberapa tanaman pinang tersebut, hasil yang diwarisi dari orang tuanya kemudian lanjut dipelihara. Di samping itu, menanam jenis tanaman lain seperti kelapa dan tanaman sayuran lainnya. Kisah sukses petani tersebut menjadi sebuah inspirasi bagi petani dan yang merasa bukan petani untuk terjun menggeluti usaha budi daya pinang. Terlebih di saat pinang menjadi satu komoditas primadona yang memiliki potensi ekspor berharga tinggi. Hal ini turut membuat para petani menjadi lebih bergairah dalam menjalankan usahanya. Memang kisah sukses dalam usaha budi daya pinang tidak semua dialami oleh banyak petani. Keberhasilan seorang petani pinang adalah ketika dilakukan dengan serius, tekun, dan konsisten. Tidak jarang pula banyak petani yang mengalami kerugian terlebih ketika harga biji pinang terjun bebas. Itulah sebabnya keluarga petani memilih melakukan penanaman komoditas tani secara beragam sebagai upaya memperbanyak sumber pemasukan ekonomi keluarga.

Ketika iklim usaha budi daya pinang mengalami kelesuan, ditandai dengan anjloknya harga produk di pasaran, tidak lantas keluarga petani pinang ini bermuram diri. Pemeliharaan lahan tumbuh, pemanenan, pengupasan, penjemuran, sampai penyimpanan tetap dilakukan. Sebagian dijual, sebagian lain mereka simpan di gudang sebagai cadangan sambil menunggu harganya kembali normal. Memang kalau dihitung, besarnya energi yang dikeluarkan untuk melakukan seluruh rangkaian budi daya dari hulu sampai pada proses perlakuan pascapanen tidaklah sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Butuh waktu lama sebelum biji pinang siap dipinang pembeli, minimal satu sampai dua minggu supaya biji pinang benar-benar kering (lihat Gambar 2.5). Pada tahap kegiatan pemanenan dan pengupasan, terlebih ketika produksi biji pinang dianggap tinggi, petani yang memiliki modal lebih biasanya akan membayar orang lain untuk melakukannya dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.000,-/kg. Orang lain yang membantu petani dalam melakukan kegiatan tersebut umumnya berasal dari tempat di mana mereka tinggal, bisa kerabat atau tetangganya. Oleh karena itu, untuk memangkas biaya yang dianggap tinggi, untuk sementara mereka lakukan sendiri, hanya cukup memenuhi kebutuhan penjualannya saja.

Sementara itu, sebagian petani lain memilih tidak melakukan apa-apa dan membiarkan setiap biji pinang jatuh sendiri (lihat Gambar 2.6) dan memilih melakukan usaha lain, bisa dari usaha tani, atau melakukan usaha serabutan lainnya. Biasanya keluarga petani pun memiliki lebih dari satu profesi tidak hanya bertani. Ada yang membuka bengkel motor, menjadi sopir, bahkan ada yang bekerja sebagai PNS.



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.5 Proses Pengeringan Biji Pinang dan Penyimpanannya

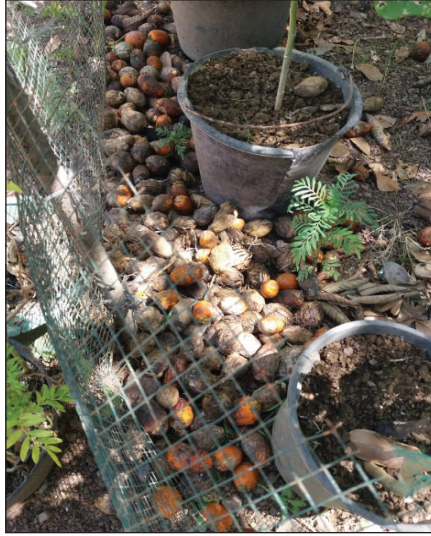


Foto: Eki (2023)

Gambar 2.6 Biji Pinang yang Dibiarkan di Pekarangan

Jatuhnya harga pinang memang bisa membuat petani harus memutar otak untuk mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecuali bagi mereka yang memiliki lahan tani lain dan memiliki sumber penghasilan lain. Namun, semuanya berharap harganya akan segera naik kembali.

J. Penutup: Kilas Balik Pendataan Sensus Pertanian: Sebuah Refleksi dari Kabupaten Aceh Besar

Terbukanya pasar ekspor pinang menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam pengembangan potensi pinang di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Aceh ini. Semua berharap kalau gairah prospektif bisnis berbasis pinang ini akan terus lestari di berbagai macam situasi. Kehadirannya diharap tetap memberi janji yang pasti terutama bagi petani.

Dengan adanya pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, ini kita berharap akan membawa perubahan bagi terciptanya kondisi pertanian yang berkelanjutan. Mulai dari hal yang sangat simpel, data yang sudah dikoleksi mampu diterjemahkan secara jernih sesuai amanat tema-tema pertanian berkelanjutan dan mampu mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan petani mengatasnamakan keadilan. Penerapan program-program pertanian berkelanjutan mesti dapat menjadi landasan keuntungan dari berbagai sisi, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.

Data numerik yang tertangkap dalam formulir pertanyaan sensus pertanian tahun ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam menghasilkan produk kebijakan pertanian yang berkeadilan dan pro petani terutama petani kecil yang tidak berdaya. Data yang tampil tidak hanya menyiratkan angka tanpa makna, mudah-mudahan angka tersebut dapat memberikan bobot dalam memperkuat tujuan melaksanakan pembangunan pertanian di Indonesia secara komprehensif termasuk di wilayah Aceh Besar ini, sehingga tidak salah jika Sensus Pertanian 2023 ini selain sebagai kegiatan formal tiap sepuluh tahun, tetapi juga sebagai media curhatan aspirasi rakyat dalam menyampaikan keluhan kesah dan kendala yang dihadapinya kepada pemerintah. Sensus Pertanian 2023 harus menjadi momen penting dalam menciptakan ikatan sentimen yang kuat antara rakyat dan pemerintahannya, sehingga tidak lagi melahirkan adanya “ketidakpercayaan” pada masyarakat, tetapi berubah menjadi “keberdayaan” yang dimulai dari data-data yang terhimpun lewat pendataan demi tegaknya keadilan dalam pembangunan pertanian di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Andesmora, E. V. (2021). Potensi budidaya tanaman pinang (*Areca catechu* L.) di lahan gambut: Studi kasus di KHG Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(1), 219–227. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPT/article/view/11798/7508>
- Asih, S. N. (2023, 20 Juni). Sensus pertanian 2023: Pijakan untuk pertanian masa depan. *Detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-6782857/sensus-pertanian-2023-pijakan-untuk-pertanian-masa-depan>

- Asrar, K., Makmur, T., & Zakiah. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pinang di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(1), 59–66. <https://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/6638>
- Badan Pusat Statistik. (2023a, 1 Juni). *BPS mulai melaksanakan Sensus Pertanian 2023*. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/06/01/532/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani*. Sensus Pertanian 2023. Diakses pada 18 Juni, 2025, dari <https://sensus.bps.go.id/st2023/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2023). *Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2023*. <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/35162f080cf7f47e5a70a20e/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2023.html>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (t.t.). *Profil kawasan Aceh Besar*. UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Diakses pada 18 Juni, 2025, dari <https://uptdppkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-besar>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2020). *Laporan tahunan tahun 2020*. <https://distanbun.acehprov.go.id/halaman/laporan-tahunan>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2022). *Statistik Perkebunan Aceh 2021*. https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/O87E/Statistik_Perkebunan_Aceh_2021.pdf
- Firmanda, N., Baga, L. M., & Purwono, J. (2022). Analisis pemasaran pinang di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 126–141. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.126-141>
- Hanafiah, J. (2022, November 20). Perlahan, luas sawah di Aceh berkurang. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/11/20/perlahan-luas-sawah-di-aceh-berkurang/>
- Herianto. (2021a, September 3). Pinang, komoditi mudah disukai petani, ini dilakukan Distanbun untuk kembangkan tanaman ini se-Aceh. *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/03/pinang-komoditi-mudah-disukai-petani-ini-dilakukan-distanbun-untuk-kembangkan-tanaman-ini-se-aceh>

- Herianto. (2021b, September 3). Ekspor pinang Aceh ke Iran, Thailand & Malaysia, tiap bulan Rp 31 miliar, ini harga pinang di Aceh. *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/03/ekspor-pinang-aceh-ke-iran-thailand-malaysia-tiap-bulan-rp-31-miliar-ini-harga-pinang-di-aceh>
- Husna, R., Azhar, & Marsudi, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 525–533. <https://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/9394>
- Juli, M. (2023, 16 Juni). *Harga iinang Aceh hancur-hancuran. Komparatif*. <https://komparatif.id/harga-pinang-aceh-hancur-hancuran/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023, June 1). *BPS mulai laksanakan Sensus Pertanian 2023*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49374/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023/0/artikel_gpr
- Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. (n.d.). *Budidaya tanaman pinang (Areca catetchu L.)*. <http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Budidaya%20Pinang.pdf>
- Lagiman. (2020). Pertanian berkelanjutan: Untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta*, 365–381. https://eprints.upnyk.ac.id/24326/1/b4%20FULL%20PAPER_LAGIMAN.pdf
- Megasari, L. A. (2019). *Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)* [Undergraduate thesis, Universitas Airlangga]. Airlangga University Repository. <http://repository.unair.ac.id/87566/>
- Panduan lengkap budidaya pinang betara. (t.t.). Diakses pada 1 Oktober 2025. https://www.kartani.co.id/panduan-budidaya-pinang-betara/?s_rsltid=AfmBOorHEasRs0egCFNIuM2s3HLVPD8D3B1vbzcIGzZqyKA4DW1HhE8S
- Parma, P. G. (2014). Pengembangan model penguatan lembaga pertanian sebagai prime mover pembangunan kawasan daerah penyangga pembangunan (dpp) destinasi wisata Kintamani – Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 380–393. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/2928/2428>

- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2021). *Geografis*. <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>
- Pradiana, W., & Anantanyu, S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Bendungan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 82–94. <https://prospectpublishing.id/ojs/index.php/jpm/article/view/21/23>
- Putri, I. (2023, June 12). Ini sederet data yang akan diambil dalam Sensus Pertanian 2023. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6767464/ini-sederet-data-yang-akan-diambil-dalam-sensus-pertanian-2023>
- Rachma, N., & Umam, A. S. (2020). Pertanian organik sebagai solusi pertanian berkelanjutan di era new normal. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 1(4), 328–338. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/jppm/article/view/4260>
- Sihombing, T. (2000). *Budidaya dan prospek bisnis pinang*. Penebar Swadaya.
- Supriyadi. (2021, July 2). *6 masalah menahun pertanian di Indonesia yang tak kunjung selesai*. Website Resmi Desa Tanjungmeru. <https://tanjungmeru.kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/547>
- Syukron, A., Sarman, S., & Salim, H. (2022). Respons pertumbuhan bibit pinang (*Areca catechu* L.) terhadap aplikasi limbah solid kelapa sawit. *Jurnal Agroecotania*, 5(1), 1–11. <https://online-journal.unja.ac.id/Agroecotania/article/view/22823>
- Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) GIS. (2021). *Katalog peta Kabupaten Aceh Besar*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Banda Aceh. <https://uptbgis.bandaacehkota.go.id/katalog/peta/detail/admin-aceh-besar>
- Universitas Stekom. (t.t.). Pinang. In *Ensiklopedia dunia*. Retrieved June 18, 2025, from <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pinang>
- Wulansari, I. (2019, 30 Mei). Pertanian berkelanjutan: Untuk keamanan pangan atau untuk ketahanan petani? *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/30/pertanian-berkelanjutan-untuk-keamanan-pangan-atau-untuk-ketahanan-petani/>